

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS
TAHUN 2022**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

TAHUN 2023

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,01	67,78	1,149
2	Angka Kemiskinan	13,89	13,34	-3,960
3	Angka Pengangguran*	2,78	1,92	-30,935
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,33	4,06	74,249
5	Pendapatan Per kapita	51.200,68*	55.484,39**	8,367
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,280	0,328	17,143

Sumber data : BPS Kab. Musi Rawas

Keterangan :

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara

II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	63,83%
1.1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	181
1.2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9.373
1.3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.373
1.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	121
1.5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	685
1.6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	253

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.7	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	316
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,06%
2.1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	368
2.2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	46.979
2.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	21.811
2.4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	46.979
2.5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	21.811
2.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	210
2.7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	184
2.8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2904
2.9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1275
2.10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	238
2.11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	10
2.12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	230
2.13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	221
2.14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2185
2.15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1083
2.16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
2.17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70
2.18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	38
2.19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	51
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,18%
3.1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	368
3.2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	46.979
3.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	21.811
3.4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	46.979

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
3.5.	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	21.811
3.6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	210
3.7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	184
3.8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2904
3.9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1275
3.10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	238
3.11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	10
3.12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	230
3.13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	221
3.14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2185
3.15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1083
3.16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
3.17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	70
3.18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	38
3.19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	51
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	82,32%
4.1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	11
4.2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1392
4.3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1392
4.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	63
4.5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	139
4.6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	139
4.7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	318
4.8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	12

2. Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,273
1.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00%
2.1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,64%
3.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Vaksin Tetanus Difteri (Td) : 95,64% Tablet Tambah Darah : 95,64% Alat deteksi resiko Ibu Hamil : 95,64% Kartu ibu/Rekam medis ibu : 95,64% Buku KIA : 95,64%
3.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas : 19 org Pj Perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,05%
4.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	formulir partograf : 71,21 % Kartu ibu : 71,21 % Buku KIA : 71,21%
4.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Pj Dokter umum pkm : 19 org Pj Bidan : 19 org Pj Perawat : 19 org
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,69%
5.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Vaksin Hepatitis B0 : 99,69% Vitamin K1 injeksi : 99,69% Salep/tetes mata antibiotik : 100 % Formulir BBL : 99,69% Formulir MTBM : 99,69% Buku KIA : 99,69%
5.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas: 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	96,13%
6.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Kuisiонер pra skrining Perkembangan : 96,13% Formulir DDTK : 96,13% Buku KIA : 96,13% Vitamin A biru : 96,13% Vitamin A merah : 96,13% Vaksin Imunisasi Lanjutan : 96,13% Jarum Suntik dan BHP : 96,13%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Peralatan Anafilaktik : 96,13%
6.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas: 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org Pj Ahli Gizi pkm : 19 org Pj Guru Paud : 199 desa pj Kader Kesehatan : 199 desa
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,20%
7.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku raport kesehatan : 100% Buku pematuan kesehatan : 100% Kuesioner skrining kesehatan : 90,20% Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah di dalam sekolah : 100% Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah di luar sekolah : 100%
7.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas: 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org Pj Ahli Gizi pkm : 19 org Pj Guru : 199 desa pj Kader Kesehatan : 19 pkm Pj Tenaga Kesehatan Masyarakat : 19 pkm
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,78%
8.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Pedoman dan Media KIE : 100 % Alat ukur berat badan : 100 % Formulir pencatatan dan pelaporan SIPTM : 100%
8.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas: 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Pj Ahli Gizi pkm : 19 org Pj Tenaga Kesehatan Masyarakat : 19 pkm Pj Tenaga non kesehatan terlatih : 19 pkm
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	89,39%
9.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Strip uji pemeriksaan gula darah kolesterol : 100% Instrumen GDS, AMT, ADL, P3G : 100% Buku Kesehatan Lansia : 100%
9.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas: 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org Pj Ahli Gizi pkm : 19 org Pj Tenaga Kesehatan Masyarakat : 19 pkm Pj Tenaga non kesehatan terlatih : 19 pkm
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,29%
10.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan media KIE : 100% Tensimeter : 100% Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPTM : 100%
10.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas: 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org Pj Tenaga Kesehatan Masyarakat : 19 pkm
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,65%
11.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet : 100% Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPTM : 100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Pedoman dan Media KIE : 100%
11.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj Bidan Puskesmas: 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org Pj Tenaga Kesehatan Masyarakat : 19 pkm
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00%
12.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku PPDGJ III : 100% Kit berisi 2 Alat Fiksasi : 100% Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan : 100% Media KIE : 100%
12.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes 1 org, Pj Pukesmas 19 org, dan Pj dokter umum pkm 19 org
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100,00%
13.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Media KIE : 100% Reagen Zn TB : 100% Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 : 100% Pot Dahak : 100% Catridge tes : 100% Formulir pencatatan dan Pelaporan : 100% Pedoman SOP : 100%
13.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org Pj ATLM : 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org Pj Tenaga Kesehatan Masyarakat : 19 pkm Pj Penata Rontgen : 19 pkm Pj Tenaga non kesehatan terlatih : 19 pkm
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	92,87%
14.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Media KIE : 100% RDT : 100% Bahan Media habis pakai : 100% Alat tulis rekam medis : 100%
14.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Pj Dinkes : 1 org

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
		Pj ATLM : 19 org Pj perawat : 19 org Pj dokter umum pkm : 19 org Pj Tenaga Kesehatan Masyarakat : 19 pkm Pj Penata Rontgen : 19 pkm Pj Tenaga non kesehatan terlatih : 19 pkm

3. Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	54,95%
1.1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	309.285
1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	92544,58
1.3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-
1.4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-
1.5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-
1.6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-
1.7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Ada
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,00%
2.1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00%
2.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0,00%
2.3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0,00%
2.4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0,00%
2.5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata Pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada
2.6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada
2.7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	52,42%
3.1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	61,20%
3.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	28,69%
3.3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100,00%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	99,03%
4.1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada
4.2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	-
4.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1
4.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	-
4.5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	1
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,15%
5.1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	121.012
5.2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1.725
5.3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	130.924
5.4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	-
5.5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	-
5.6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	-
5.7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	33,48%
5.8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	-
5.9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	9,38%
5.10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	90,62%
5.11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-
5.12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	-
5.13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	8,58%
5.14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	-
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00%
6.1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	77,28%
6.2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	35
6.3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada
6.4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Tidak ada
6.5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	3
6.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	-
6.7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	781
6.8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	781
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	80,52%
7.1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.420,49 KM
7.2	Panjang jalan yang dibangun	3.329 m
7.3	Panjang jembatan yg dibangun	15,90 m
7.4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	98.694,74 m
7.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	71,90 m
7.6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0 m
7.7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	103 m
7.8	Panjang jalan yang dipelihara	1.650 m

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
7.9	Panjang jembatan yang dipelihara	0
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,00%
8.1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1
8.2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	50 orang
8.3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	-
8.4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	-
8.5.	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada, SIRUP KAB MUSI RAWAS
8.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	-
8.7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	-
8.8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada 182 paket
8.9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada
8.10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	0
8.11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	0
8.12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analisis di wilayah kab/kota	0
8.13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0
8.14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada
8.15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	15
8.19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	31
8.20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	15
8.21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	-
8.22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	46
8.23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
	konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	
8.24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
8.25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi -	0%

4. Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
1.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	12.041
1.2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2
1.3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2
1.4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2
1.5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0
1.6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0
1.7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0
1.8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2
1.9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0
2.1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0
2.6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0 Ha
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0%
3.1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	81,955 Ha
3.2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	85 unit
3.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0 Ha
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	26,62%
4.1	Jumlah rumah di kab/kota	128.505
4.2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	798
4.3	Jumlah rumah tidak layak huni	34.210

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
4.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0
4.5	Rasio rumah dan KK	102,76%
4.6	Jumlah rumah pembangunan baru	1.461
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	96,94%
5.1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12
5.2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	124.575
5.3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	1.484
5.4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (onsite / offsite)	120.336
5.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0
5.6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	115.330
5.7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	8
5.8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	8
5.9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
1.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	8 kali pengaduan
1.2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	-
1.3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	19
1.4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1
1.5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	6 SOP
1.6	Tersedianya sarana prasarana minimal	4 unit mobil Pemadam Kebakaran, 3 unit motor Patroli, 2 mobil Patroli, 1 unit Mobil Dalmas, 1 unit mobil Box Logistik, Pakaian Huru-hara
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	38,46%
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	20,14%
3.1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0%
3.2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	39,65%
4.1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0%
4.2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0%
4.3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0%
4.4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0%
4.5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
4.6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,8%
5.1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0%
5.2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
5.3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%
5.4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0%
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90%
6.1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	-
6.2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	4 sektor : Pos Induk Muara Beliti, Pos Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sumber Harta
6.3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedia Petugas Piket di 4 Pos
6.4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0,00%
6.5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	4 unit mobil Pemadam Kebakaran, 22 buah selang, 16 buah Nozel, 4 Pasang Baju, 4 pasang Sepatu, 4 buah helm, 3 buah jam tangan, 3 buah tangga, 4 buah Kampak, 2 buah mesin
6.6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	85 Orang
6.7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak Ada
6.8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	85 Orang

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
7.	Waktu tanggap (responsetime) penanganan kebakaran	40 Menit

6. Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100,00%
1.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	200
1.2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	66.243
1.3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1
1.4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	66.243
1.5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2
1.6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	29.545
1.7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1
1.8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	73
1.9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	56
1.10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2
1.11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	4
1.12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	31
1.13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	4
1.14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	2.717
1.15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	31
1.16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	19.420
1.17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	49
1.18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	22.877
1.19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	11
1.20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	6
1.21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	9
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100,00%
2.1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1.402
2.2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	13

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
2.3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1
2.4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	52
2.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	52
2.6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	31

III. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

a. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Evaluasi LPPD Tahun 2021 baru akan diumumkan pada Hari Otonomi Daerah Tahun 2023 pada tanggal 25 April 2023 mendatang, sedangkan untuk Evaluasi LPPD Tahun 2020 tidak diumumkan pada Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 pada tanggal 25 April 2022 dan telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bahwa hasil Evaluasi tersebut memang belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Untuk Evaluasi LPPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dan berdasarkan Validasi terhadap Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019 se-Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 sampai dengan 17 September 2020. Kabupaten Musi Rawas memperoleh peringkat **1 (satu) se-Provinsi Sumatera Selatan** dengan Skor Kinerja **3,5583** dan Status Kinerja **TINGGI**.

b. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 menyatakan bahwa Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

IV. RINGKASANN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No Urut	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
4.	Pendapatan	1.921.168.670.324,00	1.837.643.971.978,20	95,65
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	247.238.151.722,00	138.996.716.926,79	56,22
4.2	Pendapatan Transfer - LRA	1.662.618.035.458,00	1.686.780.074.007,41	101,45
4.3	lain-lain pendapatan daerah yang sah - LRA	11.312.483.144,00	11.867.181.044,00	104,90
5.	Belanja	2.038.471.493.178,00	1.862.411.284.065,00	91,36
5.1	Belanja Operasi	1.285.554.235.242,00	1.146.479.519.297,00	89,18
5.2	Belanja Modal	453.412.394.815,00	430.569.963.839,00	94,96
5.3	Belanja Tidak Terduga	14.228.192.192,00	85.130.000,00	0,60
5.4	Belanja Transfer	285.276.670.929,00	285.276.670.929,00	100,00

Sumber Data : Laporan Realisasi APBD tahun 2022 *unaudited* (BPKAD Kab. Musi Rawas)

V. INOVASI DAERAH

Adapun inovasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebanyak 35 (Tiga puluh lima) inovasi, sebagaimana pada tabel berikut :

No	Judul Inovasi	OPD
1	Gendang Jawa (Gerakan Layanan Izin Usaha Perdagangan, Jasa dan Wirausaha)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	BEDA MURA SEMPURNA (BENGKEL PEMUDA MUSI RAWAS SEMPURNA)	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Ngopi Ling (Ngobrol Seputar Informasi Lingkungan)	Dinas Lingkungan Hidup
4	Kompot (Kompos Pot)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Smoke Fish Food (Ikan Asap/Salay)	Dinas Lingkungan Hidup
6	Hutan Kota Pelangi	Dinas Lingkungan Hidup
7	CAS Filtration	Dinas Lingkungan Hidup
8	Desinfektan Organik Covid-19	Dinas Lingkungan Hidup
9	Gerakan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JEPANG)	Dinas Ketahanan Pangan
10	AGRO TECHNO PARK (ATP) MUSI RAWAS	Dinas Pertanian dan Peternakan
11	Pepes Desa	Kecamatan TPK
12	UMA INOVASI SELANGIT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Jalan Dan Jembatan Berbasis Barcode	Dinas PU Bina Marga

No	Judul Inovasi	OPD
14	KU DATANG KARENA CINTA (KU DATA ULANG KORBAN BENCANA KU CETAK DAN KU ANTAR DOKUMEN ANDA)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	SABER PENSI (Sapu Bersih Penderita Hipertensi)	Dinas Kesehatan
16	SUMBER HARTA BERANTAS STUNTING (BERANTING)	Dinas Kesehatan
17	GOJI (GERAKAN OJEK OBAT JIWA)	Dinas Kesehatan
18	KERANJANG PAHALA	Dinas Kesehatan
19	GRAB TB (Gerakan Muara Lakitan Bebas TB)	Dinas Kesehatan
20	GERAKAN SAPU BERSIH PENDERITA PENYAKIT KRONIS DAN SENAM LANSIA (GASPOL)	Dinas Kesehatan
21	ANAK INDONESIA SEHAT TANPA JAJANAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA (BORAK DAN FORMALIN) (KANTIN SEHAT)	Dinas Kesehatan
22	SANGGAR GIZI BERAKTING PRIMA (BERSAMA ATASI ANAK STUNTING DAN PEDULI RISIKO MATERNAL)	Dinas Kesehatan
23	INOVASI SEROJA	Dinas Kesehatan
24	ANGSA EMAS (ANC BERKUALITAS EMAK MANDIRI ANAK SEHAT)	Dinas Kesehatan
25	JIWA RAGAM (JIWA RAMah keluarGA Masyarakat)	Dinas Kesehatan
26	GO BINDU (Gerakan Mobile Posbindu)	Dinas Kesehatan
27	GELAS TIMAH (Gerakan Lansia Tinjau Kerumah)	Dinas Sosial
28	SAMAT (SANTUNAN KEMATIAN)	Dinas Sosial
29	CINTA YOSI (Cara INput daTA& pelaYanan Operator SIKs-ng)	Dinas Sosial
30	Jumat Bersaksi (Jumat Berembuk Sambil Diskusi)	Dinas Sosial
31	GERBANG MU GAKIN (GERAKAN PENGEMBANGAN MADU KLANCENG/TRIGONA UNTUK KELUARGA MISKIN)	Dinas Sosial
32	PPDB Online	Dinas Pendidikan
33	1 SISWA 1 APLIKASI ANDROID	Dinas Pendidikan
34	Program Ekstrakurikuler Tahfidz (Program Unggulan) Pada SDN 05 Muara Beliti Plus	Dinas Pendidikan
35	SILAPSOS (Sistem Laporan Pekerja Sosial Masyarakat)	Dinas Pendidikan

Sumber Data : Data Inovasi Daerah (Balitbang Kab. Musi Rawas)